Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai

¹Fadilla, ²Muhizar Muchtar

^{1,2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: fadilladila6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the profit-sharing system according to Islamic law and legislation, to find out the practice of implementing a profit-sharing system in mudharabah financing and to find out the challenges faced by Islamic banks with Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banks. This study used a qualitative method, in which researchers went directly to the field to conduct interviews with employees of PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai. The results show that first, the rules of Al-mudharabah in Islam have 5 important elements, namely: Shahibul-maal, Mudharib, Shighatul-aqd, Ra'sul-maal, Ar-Ribh and the fatwa of the National Sharia Council NO. :07/DSNMUI/IV/2000 regarding mudharabah financing, as well as Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking. Second, the practice of implementing a profit sharing system at Bank Sumut KCP Syariah Binjai has been running in accordance with fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000 and in accordance with Bank Indonesia regulations which are the basis for Islamic banking operations. Third, after the issuance of Law No. 21 of 2008 PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai has not had any difficulties in carrying out the rules that apply in Law No. 21 of 2008.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Financing, Islamic Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum islam dan perundang-undangan, untuk mengetahui praktek penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi bank syariah dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, aturan *Al-mudharabah* dalam Islam memiliki 5 unsur penting yaitu: *Shahibul-maal*, *Mudharib*, *Shighatul- aqd*, *Ra" sul-maal*, *Ar-Ribh* dan fatwa Dewan Syariah Nasional NO.:07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, serta UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua, praktek penerapan sistem bagi hasil pada Bank Sumut KCP Syariah Binjai sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Ketiga, pasca diterbitkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pihak PT.

Bank Sumut KCP Syariah Binjai belum mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Bank dalam melakukan suatu kegiatan ingin memperoleh laba atau profit yang tinggi (Puteh et al., 2018). Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan beban maka secara teknik umum untuk merekayasa laba yaitu meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban. Laba atau profit merupakan pengembalian modal yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi yang dibuat dari suatu periode fiskal, dimana profit yang dihasilkan mencerminkan efektifitas operasional perusahaan dalam menjalankan kerjanya (Hikmah & Nahariah, 2019).

Sistem ekonomi Islam akan selalu berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan porsi masing-masing (Septiaran, Yun Fitriano, 2011). Misalkan 20:80 yang berarti, hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah (Muhammadinah, 2020).

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu: *pertama*, Bagi untung (*profit sharing*), adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana (Imamah, 2019). Metode ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. *Kedua*, Bagi Hasil (*revenue sharing*), adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Pada umumnya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada.

Sistem bagi hasil ini merupakan ciri khusus yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang mana menggunakan sistem bunga dalam hal pembagian keuntungannya. Mudharabah berasal dari kata dharb, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut (Rosid, 2021). Namun secara implisit, kata dasar dha-ra-ba yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.

Pada akad mudharabah di perbankan syariah dikenal apa yang disebut "dua tahap" atau "two-tier" mudharabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga "perantara" atau "intermediaries" sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal (Sulistiyawati et al., 2020).

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Abbas & Arizah, 2019). Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung (Syafiudin et al.,

2021). Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, sipemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini (Sulistyawati et al., 2020).

Menjamurnya lembaga hingga ke pelosok daerah membuat persaingan antar lembaga keuangan semakin ketat hal ini tentu mengakibatkan tidak mudah bagi suatu perusahaan termasuk Bank Syariah untuk memperoleh laba apalagi meningkatkannya (Harahap & Soemitra, 2022). Oleh karenanya Bank Syariah harus mengoptimalkan segala kemampuan yang ada serta terus berinovasi untuk meningkatkan laba, karena laba merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Bank mengelola keuangannya. Kinerja keuangan Bank merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu Bank (MA Harahap, 2021). Bagi nasabah, sebelum mendepositkan dananya di suatu Bank mereka akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan Bank tersebut melalui laporan keuangan dan laba rugi.

Penghimpunan dana dari pihak ketiga di Bank memiliki peran baik itu, tabungan, giro, maupun deposito. Semakin banyak dana yang terhimpun, maka semakin tinggi pendapatan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena Bank akan mengolah dana yang terhimpun untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Penghimpunan dana terkait distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan Bank syariah dalam bentuk produk tabungan dan deposito *mudharabah* (Islam & Ahmad, 2020).

Pembagian hasil usaha dan bagi kerugian dilakukan antara pemilik dana dan *mudharib*. Porsi bagi hasil keuntungan masing-masing pihak harus disepakati bersama ketika perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus jelas saat perjanjian dilakukan hal ini juga berlaku pada pembiayaan *mudharabah* (MA Harahap, 2020). Oleh karena itu, perbankan syariah sangat membutuhkan dana yang akan digunakan untuk operasional dalam kegiatannya, seperti transaksi hariannya, cadangan, dan juga untuk investasi (Khoirotul Inzani, Moh.Halim, 2020).

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional di PT. Bank Sumut KCP Syari'ah Binjai. Dan untuk mengetahui apakah PT. Bank Sumut KCP Syari'ah Binjai telah melakukan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti: “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Sumut KCP Syari'ah Binjai.”

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Responden penelitian ini merupakan karyawan pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Binjai. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan mereduksi data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diuraikan dengan data pendukung yang akurat agar memberikan keyakinan atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai.

Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan pembiayaan sebagai penyedia dana atau tagihan dipersamakan dengan itu berupa salah satunya berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*.

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *mudharabah* ini secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil (*gross profit margin*). Setiap pemohon pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Bank Sumut Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

Berikut mekanisme dan syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah* di PT. PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Binjai :

- a. Usaha yang dimiliki nasabah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh PT. Bank PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Binjai , yakni *track record* di Bank Indonesia harus baik, artinya tidak termasuk usaha yang ada dalam daftar hitam Bank Indonesia, tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet yang sesuai informasi dari Bank Indonesia maupun Bank Bank Sumut Syariah , serta terdaftar dalam institusi yang jelas.
- b. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah fotocopy KTP seluruh anggota perusahaan, fotocopy NPWP seluruh anggota perusahaan, akta pendirian/perubahan (bila ada), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fotocopy Surat Ijin Praktik Profesi, Neraca dan Laba Rugi 2 tahun terakhir, Laporan Aktifitas Usaha 6 bulan terakhir, Perincian Rencana Anggaran Biaya Modal Kerja/Investasi, fotocopy dokumen angunan: BPKB, Sertifikat Tanah, IMB, dan PBB terakhir.
- c. Setelah data-data dilengkapi, pihak bank akan melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait besarnya pengajuan dana dan pengguna dana yang nantinya informasi tersebut akan digunakan dalam menentukan besarnya angsuran, porsi bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan.

- d. Setelah itu manajemen akan memperoses dan menganalisis berdasarkan prinsip 5C dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh pembiayaan. Analisis 5C yakni *Charcter* atau kepribadian, *Capacity* atau kemampuan, *Capital* atau modal usaha, *Collateral* atau jaminan, *Condition of economy* atau kondisi ekonomi.
- e. Setelah menganalisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan, dilakukanlah survey dalam rangka membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dan hasil lapangan.
- f. Apabila nasabah telah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan kemudian akan langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana. Pada umumnya pencairan dilakukan secara bertahap 2-3 kali agar pihak bank dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha nasabah pembiayaan.
- g. Selama dimulainya hingga berakhirnya akad, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah, pemantauan dilakukan selama 3 bulan sekali oleh PT Bank PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai .
- h. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelunasan atau pembayaran angsuran oleh nasabah.

Bu Febriyani Nuryamin selaku Back Office Head mengatakan, “Dalam penyaluran pembiayaan, Bank PT. Bank Sumut Syariah Binjai tetap menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melakukan dari sistem syariah yang berlaku. Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, Bank PT. Bank Sumut Syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank dengan nasabah sejajar. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan untuk rasio pembagian laba pihak Bank PT. Bank Sumut Syariah hanya melakukan negosiasi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Dan dalam akad *mudharabah* pada dasarnya tidak ada gantirugi karena akad ini bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pihak Bank Bank Sumut Syariah , kecuali bila terjadi kesalahan nasabah yang disengaja, kelalaian, pelanggaran kesepakatan, nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan No. 6 pada Fatwa DSN NO: 07/DSN- MUI/IV/2000.”

Jadi dapat di simpulkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank PT. Bank Sumut Syariah Binjai sudah menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada Bank Syariah. Dimana dalam pembiayaan *mudharabah*, bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung pihak Bank Bank Bank Sumut Syariah , kecuali bila pengelola modal melakukan kelalaian yang disengaja. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah di sepakati. Sama halnya musibah yang terjadi saat ini yaitu virus corona yang menjadi kecemasan seluruh masyarakat dunia. Virus corona ini juga berdampak pada pembiayaan *mudharabah*, disini Bank PT. Bank Sumut Syariah yang sifatnya amanah bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh musibah yang terjadi saat ini, karena musibah ini murni terjadi bukan kesalahan pengelola modal (*mudharib*).

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini jarang terjadi pembiayaan macet karena bank telah memiliki perangkat analisa pembiayaan dalam mengukur layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Karena terlebih dahulu pihak bank berupaya memilih dan

mnyalurkan pembiayaan pada sektor potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan dapat berkembang secara lebih baik. Setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis, selain mengurangi resiko seminimal mungkin, return dari yang dibiayai dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.

Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- d. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali kesepakatan atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*.
- h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- i. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra"sul maal*).

Prosedur pembiayaan *mudharabah* meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan, proses awal dimulai nasabah datang kepada PT. Bank PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Binjai untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh *account manager* yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data pribadi dan data pendukung berhubungan dengan kedudukan legalitas nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK) Slip Gaji dan lain-lain. Jika permohonan pembiayaan *mudharabah* tersebut datangnya dari perusahaan maka nasabah wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan datang pendukung misalnya laporan keuangan, surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP. Menurut bu Febriyani Nuryamin selaku Back Office Head,

“Pembiayaan *Mudharabah* di Bank PT. Bank Sumut Syariah ini mulai dari proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai ke fitur dan mekanisme pembiayaan

mudharabah hingga pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri sudah sesuai dengan aturan fatwa No.07/- DSNMUI/IV/2000, dikarenakan didalam Bank Syariah itu memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. Nah DPS inilah yang selalu mengawasi jalannya sistem Bank Syariah, minimal setiap sebulan sekali DPS selalu memberikan laporan bahwa Bank yang diawasinya itu telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dari pihak PT. Bank Sumut Syariah itu sendiri untuk pembiayaan *mudharabah* dibatasi oleh Bank PT. Bank Sumut Syariah karena seluruh modalnya ditanggung oleh pihak Bank karena pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah jadi perlu kehati-hatian”.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pernyataan bu Febriyani Nuryamin bahwa praktik penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* telah sesuai karena adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah, membuat pernyataan secara berkala setiap tahun tentang bank syariah yang diawasinya bahwa telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi bank syariah yang berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah namun pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* ini tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No.:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan didalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUPS tentang ketentuan mengenai jaminan.

Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada PT. Bank PT. Bank Sumut Syariah Cabang Binjai sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini juga di sebutkan ibu Febriyani Nuryamin bahwa hingga februari 2020 total yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di Bank PT. Bank Sumut Syariah Binjai adalah 105 (seratus lima) orang.

Namun untuk data yang lebih spesifik pihak Bank PT. Bank Sumut Syariah tidak bisa memberikan dikarenakan data nasabah tersebut bersifat rahasia. Meskipun Bank PT. Bank Sumut Syariah sudah menjalankan programnya dengan sangat baik namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Bank PT. Bank Sumut Syariah itu sendiri. Adapun kendalanya ialah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki resepsi yang keliru mengenai operasi bank syariah. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah.

Upaya meningkatkan pemahaman ini dilaksanakan karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Dengan demikian pada saat ini pemahaman masyarakat mengenai sistem dan prinsip pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah sebagian besar masih kurang tepat. Sehingga dalam hal ini bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bentuk syariah masih sangat perlu disosialisasikan terkhususnya tentang pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Dan diharapkan terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur produk

perbankan syariah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan diharapkan dapat bertahan pada situasi perbankan saat ini, dimana persaingan antara bank semakin kuat. Terus dapat meningkatkan kemampuan sendiri serta meningkatkan pemasaran dan pelayanannya.

Pembahasan

Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan

a. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Allah Swt. telah menentukan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro maupun skala makro. Allah juga mengatur seluruh permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha bisnis, investasi dan pembagian keuntungan, sehingga umat muslim bisa menjalankan usahannya tanpa harus melanggar aturan-aturan Allah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah.

Para ulama telah sepakat sistem penanaman modal ini dibolehkan. Salah satu dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya seperti dinuklilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Ibnu Hazm mengatakan "semua bab dalam fiqh selalu memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah" Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem *muamalah* ini dan persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam termasuk satu jenis sunnah.

Pembagian keuntungan investasi menurut syariat Islam antara pemodal dan pengelola, sebagai umat muslim mengenal pembagian menurut syariat Islam dengan azas *Al-Mudharabah* yang artinya bagi hasil. Dimana pembagian hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, jadi tidak ada yang merasa di dzohlimi antara penanam modal dan pengelola.

Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata dharab dimuka bumi, yang artinya melakukan perjalanan umumnya untuk berniaga dan berperang.

Aturan *Al-Mudharabah* dalam Islam ialah *Al-Mudharabah* memiliki 5 unsur penting yaitu:

- a. *Shahibul-maal* (Pemilik Modal/Investor)
- b. *Mudharib* (Pengelola)
- c. *Shighatul-aqd* (ucapan ijab dan qabul atau serah terima dari investor ke pengusaha)
- d. *Ra'sul-maal* (modal)
- e. *Ar-Ribh* (keuntungan)

Akad *Al-Mudharabah* membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak. Dan kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Oleh karena itu ijab qabul, modal harus terpenuhi hal-hal tersebut

- a. Adanya kesepakatan jenis usaha
- b. Adanya keridhan dari kedua belah pihak
- c. Diucapkan atau ditulis dengan lafaz yang jelas dan bisa mewakili keinginan investor maupun pengusaha.

Karena akad ini adalah akad kepercayaan, maka sebaiknya tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Untuk modal para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha, ke empat syarat tersebut yaitu:

- a. Harus berupa uang. Para ulama berijma“ bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang.
- b. Harus nyata ada dan bukan utang
- c. Harus diketahui nilai harta tersebut. Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang
- d. Harus diserahkan kepada pengusaha.

Adapun untuk jenis usaha tidak ada pembatasan dalam *Al- Mudharabah*. *Al- Mudharabah* bisa terjadi pada perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa dan lain-lain dan yang paling penting usaha tersebut harus halal menurut syariat Islam.

Beberapa ulama mensyaratkan tiga persyaratan dalam pembagian keuntungan:

- a. Mesti ada pemberitahuan kalau modal yang dikeluarkan yaitu untuk hasil keuntungan, bukanlah ditujukan untuk uang saja.
- b. Mesti dipresentasikan keuntungan untuk investor serta pengusaha dan harus diputuskan dari pertama akad. Besar presentasi keuntungan yaitu bebas, tergantung perjanjian pada kedua belah pihak.
- c. Keuntungan cuma untuk kedua belah pihak. Jika ada orang lain yang dipekerjakan diijinkan untuk memasukkan sisi orang itu dalam presentase keuntungan.

Keuntungan diperoleh jika semua modal investor sudah kembali 100%. Bila modal investor belum kembali semuanya, jadi pengelola tidak memiliki hak memperoleh apa-apa. Oleh karena itu *Al-Mudharabah* mempunyai kemungkinan memikul kerugian untuk kedua belah pihak. Untuk investor dia kehilangan hartanya serta untuk pengelola tidak mendapatkan apa-apa.

Serta yang perlu diperhatikan dalam *Al-Mudharabah* keuntungan diperoleh dari presentase keuntungan bersih. Sesuai dengan syariat Islam sudah mengatur umatnya supaya tidak ada kezaliman para pengelola dan investor, dan tidak pernah ada riba serta mencegah perekonomian Islam lemah. Sungguh indahny Islam karena memudahkan umatnya dalam melakukan usaha dan agar tetap berada dijalan syariat Islam.⁴⁵

Sistem Bagi Hasil Menurut Perundang-Undangan

Dasar hukum mengenai Bank Syariah mengacu pada Undang-Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Adapun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 2 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan

waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur di dalam syariah; atau
- d. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dan yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu juga dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah huruf (c). Pada ayat (1) huruf (c) dikatakan bahwa menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Adapun peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada pasal 2 dalam Peraturan tersebut dikatankan bahwa:

- a. Kegiatan usaha penghimpun dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan.
- b. Dalam pelaksanaan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar, maisir, riba, zalim* dan objek haram.

Tantangan Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan dan atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang- undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 undang- undang tersebut yaitu: “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 NO. 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Pengertian Bank Syariah menurut pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, pada angka 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pada angka 10 disebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.⁴⁹

Menurut ibu febriyani Nuryamin selaku Back Office Head Bank PT. Bank Sumut Syariah Binjai, “menurutnya secara umum sampai saat ini belum ada kesulitan- kesulitan yang dihadapi pasca di berlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008, karena sampai saat ini Undang-undang tersebut belum ada yang menyeleweng dari prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah . Ibu Febriyani berharap Undang-undang tersebut dapat mendorong pengembangan jaringan kantor Bank PT. Bank Sumut Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.Dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Bank Sumut Syariah .”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasca diterbitkannya Undang- Undang No 21 Tahun 2008 pihak PT. Bank Sumut Syariah Binjai belum mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008, karena aturan-aturan tersebut belum ada yang menyeleweng dari prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Bank Sumut Syariah yaitu prinsip-prinsip yang sesuai dengan Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil dalam Islam dikenal dengan *Al-Mudharabah*. dan sistem bagi hasil ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan *Al-quran* dan *As-Sunnah*. Adapun aturan yang harus ada dalam *Al-Mudharabah* ini ialah: *Shahibul maal* (Pemilik Modal), *Mudharib* (Pengelola), *Shighatul-aqd* (Ijab Qabul), *Ra''sul-maal* (Modal), *Ar-Ribh* (Keuntungan). Sedangkan Sistem Bagi Hasil menurut Perundang-Undangan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
2. Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai memulai proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai ke fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* hingga pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri sudah sesuai dengan aturan fatwa No.07/-DSNMUI/IV/2000. Dan bahwa praktik penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai telah sesuai karena adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
3. Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Syariah pasca diberlakukannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008. Secara umum sampai saat ini belum ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bank Sumut Syariah, karena aturan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut belum ada yang menyeleweng dari prinsip- prinsip syariah yang diterapkan oleh Sumut Syariah, bahkan setelah diterbitkan Undang-Undang tersebut kedudukan Perbankan Syariah dalam pengaturan yang diterapkan tentang sistem pengawasan untuk Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Sumut Syariah saat ini lebih jelas aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>
- Imamah, I. F. (2019). PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA (Studi Kasus pada

- KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 199. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudharabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>
- Khoirotul Inzani, Moh.Halim, E. F. (2020). AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 110–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>
- Muhammad Arfan Harahap. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. Insan Cendekia Mandiri. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Muhammad Arfan Harahap1, M. H. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/40>
- Muhammadinah. (2020). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, IV(2), 105–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2850>
- Puteh, A., Rasyidin, M., & Mawaddah, N. (2018). Islamic banks in indonesia: Analysis of efficiency. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 331–336. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00062>
- Rosid, M. (2021). Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–73. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.55-73>
- Septiaran, Yun Fitriano, O. (2011). PENGARUH RETURN BAGI HASIL (MUDHARABAH MUTLAQAH) TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH MANDIRI. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 112–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2>
- Sulistiyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.32400/iaj.28894>
- Syafiudin, A., Latif, S. A., & Saprudin, S. (2021). AKAD MUDHARABAH DAN STRATEGI MANAJEMEN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>